

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Batu merupakan salah satu kota di Indonesia yang menerapkan konsep paradiplomasi dalam mengelola daerahnya. Pada dasarnya, pemerintah daerah tidak sembarang melakukan praktik paradiplomasi. Segala praktik kerjasama luar negeri yang direncanakan selalu ditimbang sesuai dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.¹ Secara historis, Kota Batu pernah melaksanakan proses penjajakan sebagai upaya praktik paradiplomasi beberapa kali, seperti dengan Nonsan (Korea Selatan) dalam sektor pendidikan, Fukushima (Jepang), dan Australia Barat dalam sektor pertanian. Dalam rencana yang dijabarkan dalam proses penjajakan dengan Fukushima, kerjasama antara Kota Batu dan Fukushima akan berlangsung setidaknya selama 10 tahun untuk saling meningkatkan sektor pertanian. Pembicaraan antara Fukushima dan Kota Batu dalam melaksanakan praktik hubungan kerjasama sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2016. Pembicaraan mengenai hubungan kerjasama itu juga diiringi dengan studi lapangan kunjungan sebanyak tiga kali hingga tahun 2018.² Namun pada akhirnya, proses penjajakan ini tidak membuahkan hasil karena memiliki hambatannya tersendiri, seperti proses persetujuan DPRD yang tak kunjung mendapatkan

¹ Wawancara penulis dengan staff Bagian Pemerintahan Kota Batu, Novi, Batu, 4 Januari 2024.

² Hiski Darmayana, *Pemkot Batu dan Jepang Lanjutkan Penjajakan Sektor Pertanian*, diakses dalam <https://www.gesuri.id/pemerintahan/pemkot-batu-dan-jepang-lanjutkan-penjajakan-sektor-pertanian-b1VY4Zhh> (17/02/2024, 18:27 WIB)

verifikasi, hingga akhirnya terhambat pula oleh pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020.³

Rencana paradiplomasi dengan Nonsan dan Australia Barat juga memiliki hambatan yang sama. Dalam proses paradiplomasi tak bisa dipungkiri jika ada banyak tahapan yang harus dilalui sebelum benar-benar terbentuk sebuah MoU (Memorandum of Understanding). Memang pada nyatanya Kota Batu seringkali mendapatkan tawaran hubungan kerjasama luar negeri dari mitra-mitra potensial seperti Nonsan dan Australia Barat, namun banyaknya tahapan proses yang harus dilalui justru menjadi masalah tersendiri bagi Kota Batu. Berdasarkan wawancara penulis dengan staff bagian pemerintahan kerja sama Kota Batu, Kota Batu sebelumnya tidak pernah benar-benar berhasil menjalankan praktik paradiplomasi, di mana semua proses paradiplomasinya hanya berhenti di proses peninjauan semata.⁴

Dalam perkembangannya, pada akhirnya Kota Batu kembali menjalankan upaya untuk melakukan praktik paradiplomasi kembali sejak tahun 2021 untuk menunjang pengembangan sektor pariwisatanya. Pada dasarnya, Kota Batu merupakan sebuah kota pariwisata yang perekonomiannya banyak bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata. Tak bisa dipungkiri jika sektor pariwisata memang memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang ditonjolkan Kota Batu bersamaan

³ Wawancara penulis dengan kepala bidang pertanian Dinas Pertanian Kota Batu, Ani, Batu, 21 Desember 2023.

⁴ Op. Cit.

dengan sektor pertaniannya.⁵ Potensi alam yang dimiliki oleh Kota Batu juga sangat mendukung dalam menunjang sektor pariwisatanya dan menjadi kekuatan tersendiri untuk menarik wisatawan, di mana hal tersebut disadari oleh Kota Batu sehingga pengembangan pariwisatanya dilakukan secara massive, hal ini selaras dengan apa yang tercantum dalam undang-undang nomor 9 tahun 1990 bahwasanya sektor pariwisata memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan nasional yang juga memberikan efek beruntun terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi.

Pada tahun-tahun sebelumnya, Kota Batu memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang cukup tinggi. Namun, kemerosotan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh resesi sektor utama Kota Batu, yakni industri pariwisata. Kondisi ini terjadi karena kebijakan pembatasan sosial berkala dan penerapan protokol kesehatan yang ketat untuk menanggulangi pandemi covid-19 yang berdampak langsung pada berhentinya aktivitas pariwisata. Keadaan semakin memburuk dengan terhentinya operasional sektor penyedia akomodasi, makanan, minuman, dan berbagai jasa yang secara signifikan terkait dengan industri pariwisata.⁶ Penurunan kunjungan wisatawan dan pembatasan aktivitas ekonomi pada akhirnya memberikan dampak negatif pada daya roda perputaran ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini mendorong pemerintah daerah setempat untuk merespons

⁵ Feri Ardiansyah, *PJ. Wali Kota Batu Promosikan Potensi Pariwisata, Pertanian, dan UMKM*, diakses dalam https://tri.co.id/daerah/389885/pj-wali-kota-batu-promosikan-potensi-pariwisata-pertanian-dan-umkm?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%2BCampaign (17/02/2024, 20:06 WIB).

⁶ Pemerintah Kota Batu, 2022, *Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batu Tahun 2017-2022*, Kota Batu, hal. 51.

dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang terarah dan inovatif. Kota Batu dianggap perlu untuk mengadaptasi strategi ekonomi yang lebih fleksibel untuk mengatasi masalah semacam ini.

Tercatat hingga tahun 2023, jumlah wisatawan yang berkunjung di Kota Batu bisa dikatakan membaik pada pasca-pandemi dalam kategori wisatawan nusantara, namun terbilang kurang memuaskan dalam kategori wisatawan asing.⁷ Sehingga bisa ditarik pernyataan bahwasanya promosi atau branding Kota Batu sendiri dikatakan sudah berhasil dan kuat dalam skala nusantara, namun terbilang cukup lemah dalam skala mancanegara sehingga Kota Batu dirasa perlu untuk mengambil pendekatan baru untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata, serta promosi dalam meningkatkan visibilitas pariwisatanya dalam kancah internasional. Pendekatan yang dilakukan oleh Kota Batu dalam meningkatkan pengembangan pariwisata terbilang cukup baru, yaitu melalui pemanfaatan era globalisasi untuk melakukan praktik paradiplomasi melalui keanggotaannya dalam organisasi internasional yang disebut sebagai Tourism Promotion Organization sejak tahun 2021.

Pemerintah Kota Batu tahu betul bahwasanya perlu diambil sebuah tindakan untuk kembali mengenalkan pada masyarakat internasional akan eksistensi pariwisatanya. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, Kota Batu mengambil kesempatan untuk mengelola daerahnya sendiri dan menjadi aktor dalam hubungan internasional untuk mengembangkan sektor pariwisatanya di

⁷ Op. Cit.

kancah internasional. Pemerintah Kota Batu menganggap pendekatan semacam ini bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan. Hal ini semakin membuktikan pernyataan bahwasanya praktik paradiplomasi dalam hubungan internasional di Indonesia memang menjadi semakin marak dilakukan karena dianggap sebagai sebuah cara yang mudah dan efektif untuk mencapai kepentingan regional yang seringkali tidak menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sehingga penggunaan hak otonomi daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri semacam ini dengan membentuk hubungan kerjasama luar negeri menjadi sesuatu yang lebih praktis, terlebih lagi pelaku daerah sendiri dianggap lebih mengetahui kondisi dan potensi daerahnya sendiri jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.⁸

Pemerintah Kota Batu menganggap bahwa organisasi Tourism Promotion Organization (TPO) yang berdiri sejak tahun 2002 merupakan sebuah organisasi internasional yang sangat potensial sebagai mitra dalam melakukan praktik paradiplomasi berdasarkan latar belakang TPO yang memang bergerak dalam bidang promosi serta pengembangan pariwisata antar-kota dalam kawasan Asia Pasifik yang sudah menjadi pusat promosi dari 16 negara.

Tourism Promotion Organization pada dasarnya merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 2002 yang dibentuk sebagai respon dari kesadaran akan potensi ekonomi dan sosial yang terkandung dalam industri pariwisata dalam agenda konferensi tingkat tinggi Asia-Pasifik ke 5, di

⁸ Dicky Sulaiman, *Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung – Suwon (Korea Selatan) Melalui Kerjasama Sister City Dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan*, Tesis. Bandung : Universitas Komputer Indonesia.

mana tujuan diberdirikannya organisasi ini adalah untuk membantu mempromosikan pertukaran informasi serta pengembangan industri pariwisata antar kota yang menjadi anggotanya dalam kawasan Asia Pasifik. TPO memiliki fungsi sebagai pusat jejaring forum pariwisata untuk menghubungkan pemerintah kota maupun swasta dalam industri pariwisata. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk pengembangan pariwisata yang meliputi berbagai agenda, seperti pertukaran informasi antar anggota, melakukan pemasaran destinasi wisata, pengembangan produk pariwisata, serta pembinaan sumber daya manusia untuk menunjang perkembangan sektor pariwisata dari anggotanya.⁹

Berdasarkan latar belakang Tourism Promotion Organization yang selaras dengan visi dan misi Kota Batu sebagai kota pariwisata itu lah pemerintah Kota Batu memutuskan untuk melakukan inisiasi dan mendaftarkan diri menjadi anggota ke-140. Inisiatif paradiplomasi yang dilakukan Kota Batu pada tahun 2021 untuk menjadi anggota TPO dinilai menjadi langkah yang baru sebagai perwujudan dari upaya Kota Batu untuk menggali potensi pariwisatanya lebih dalam dengan menggaet organisasi internasional yang berfokus dalam jejaring komunitas pariwisata dalam kawasan Asia Pasifik, di mana hal ini diharapkan dapat menjadi media bagi Kota Batu untuk meningkatkan daya saingnya dalam skala internasional sebagai kota pariwisata. Harapan tersebut didasari dengan pemahaman akan banyaknya agenda TPO yang mendukung pertumbuhan pariwisata dari anggota-

⁹ Ulfah Khulafah, *Peran Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific Cities Dalam Mendukung Pariwisata Indonesia di Kota Surabaya Periode 2016-2021*, Skripsi, Jakarta : Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

anggotanya seperti pengadaan pameran internasional, pengadaan program capacity building, pertukaran budaya, juga promosi secara internasional.

Topik paradiplomasi Kota Batu menjadi menarik untuk dibahas karena mencerminkan kesadaran dari pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan global yang dialaminya dalam kemerosotan wisatawan asing melalui praktik hubungan kerjasama luar negeri. Dengan merinci praktik paradiplomai Kota Batu, dalam penelitian ini penulis akan menyorot bagaimana upaya paradiplomasi Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisatanya melalui Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific.

Dalam pemahaman konsep paradiplomasi dan implemenetasinya di Kota Batu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran baru tentang bagaimana kota pariwisata dapat memanfaatkan hak otonomi daerahnya untuk meningkatkan posisi mereka dalam kancah internasional melalui kerjasama luar negeri. Dengan demikian praktik paradiplomasi di Kota Batu dengan TPO dapat dijadikan sebagai referensi bagi kota-kota pariwisata lainnya yang ingin mengadopsi strategi serupa untuk melakukan pengembangan sektor pariwisatanya secara internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang penulis angkat adalah **“Bagaimana Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kota Batu Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Melalui Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific?”**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis merumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

- a) Untuk menjelaskan upaya paradiplomasi Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, ada dua manfaat utama yang bisa didapatkan dari penelitian ini, yaitu :

- a) Manfaat Akademis

Untuk manfaat akademis, diharapkan dengan adanya penelitian ini para akademisi bisa mendapatkan tambahan wawasan akan praktik paradiplomasi, khususnya di Kota Batu. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu membantu bidang keilmuan dengan menjadi sumber referensi dan riset akan penelitian di masa mendatang dalam konteks yang relevan.

- b) Manfaat Praktis

Diharapkan atas penelitian ini, para praktisi yang bergerak dalam bidang pemerintah daerah mampu mendapatkan gambaran akan praktik paradiplomasi dan penggunaan hak otonomi daerah untuk mengelola daerahnya sendiri khususnya dalam sektor pariwisata. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi kota-kota pariwisata lainnya

yang ingin mengadopsi strategi serupa dengan Kota Batu untuk turut serta melakukan pengembangan sektor pariwisata dalam kancah internasional melalui praktik paradiplomasi.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan analisis untuk mengevaluasi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas terkait praktik paradiplomasi dan peran pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam menjalin kerjasama internasional untuk mengelola daerahnya sendiri menggunakan hak otonomi daerah yang dimilikinya. Penjelasan dalam penelitian terdahulu bukan hanya sebagai pembatas untuk menghindari tumpang tindih dan kesamaan dengan riset sebelumnya, namun juga memainkan peranan penting dalam memperkaya informasi terkait riset ini karena topik yang penulis angkat memiliki kesamaan kasus dan kondisi, sehingga menjadikan penelitian terdahulu menjadi rujukan yang relevan bagi penulis. Dengan memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh dalam penelitian terdahulu, penelitian ini dapat mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mendalam, serta mampu turut serta dalam berkontribusi pada pengembangan pemahaman terhadap politik paradiplomasi dan peran pemerintah daerah dalam konteks internasional. Berikut ini penulis lampirkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis.

1.4.1. Paradiplomasi Entitas Sub-Nasional di Indonesia dengan Tourism Promotion Organization

Penelitian pertama yang digunakan oleh penulis adalah jurnal **Upaya Kota Baubau Dalam Bergabung Menjadi Anggota TPO (Tourism Promotion Organization For Asia Pacific Cities) Tahun 2019** oleh Alsafir di tahun 2021. Penelitian ini dimulai dengan penjabaran singkat tentang sejarah Kota Baubau dan potensi pariwisata yang dimilikinya. Dalam penelitian itu, Alsafir juga memaparkan praktik paradiplomasi Kota Baubau dengan Seoul dalam bentuk sister-city pada tahun 2009. Dipaparkan bahwasanya Kota Baubau memiliki orientasi yang tinggi dalam meningkatkan sektor pariwisatanya, terlebih lagi dalam kancah internasional. Sehingga menjadi penting bahwasanya Kota Baubau turut serta mengupayakan paradiplomasi dengan bergabung sebagai anggota Tourism Promotion Organization untuk terus mengembangkan sektor pariwisatanya.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya upaya Kota Baubau bergabung sebagai anggota Tourism Promotion Organization tidak terlepas dari tujuan untuk memberikan kontribusi pada perekonomian daerah setempat melalui pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata dianggap tidak mudah dikarenakan adanya persaingan yang cukup tinggi, sehingga perlu diadakan sebuah pendekatan baru untuk mempromosikan pariwisata secara internasional sebagai upaya untuk memelihara, mengembangkan, dan mempromosikan potensi pariwisatanya melalui promosi internasional untuk menarik minat wisatawan

asing.¹⁰ Namun, kelemahan dari jurnal ini adalah tidak benar-benar membahas upaya Kota Baubau dalam bergabung sebagai anggota TPO, melainkan justru mengalihkan fokus pada kegiatan lain seperti diplomasi Kota Baubau dengan sister city bersama Seoul. Selain itu, tidak dibahas pula praktik paradiplomasi semacam apa yang dilakukan oleh Baubau dalam TPO.

Penelitian kedua yang digunakan penulis adalah jurnal **Upaya Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities Dalam Mendukung Pariwisata Indonesia di Kota Surabaya Periode 2016-2021** oleh Ulfah Khulafah di tahun 2022. Penelitian ini diawali dengan pemaparan singkat tentang profil Tourism Promotion Organization. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwasanya Kota Surabaya sudah bergabung dengan TPO sejak tahun 2002 dengan motif sebagai bentuk partisipasi dalam mempromosikan city branding pariwisatanya yakni Sparkling Surabaya. Tujuan utama dari bergabungnya Surabaya dalam TPO tidak terlepas dari keinginan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, hal ini didasari dengan asumsi bahwasanya China, Jepang, Korea Selatan, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, Uzbekistan, dan Vietnam telah berhasil dalam sektor kepariwisataan karena bergabung dalam TPO, sehingga kota Surabaya mengharapkan hasil yang serupa.

Adapun temuan dari penelitian ini adalah TPO mampu memberikan 3 fungsi utama dalam pengembangan pariwisata kota Surabaya, yakni TPO sebagai pusat

¹⁰ Alsafir, *Upaya Kota Baubau Dalam Bergabung Menjadi Anggota TPO (Tourism Promotion Organization For Asia Pacific Cities) Tahun 2019*, eJournal Hubungan Internasional, Vol, 9, No, 4 (2022), Indonesia : Universitas Mulawarman.

pemasaran pariwisata, TPO sebagai pusat informasi pariwisata, dan TPO sebagai pusat jaringan pariwisata antar kota.¹¹ Berdasarkan hasil analisis Ulfah Khulafah, TPO telah berhasil memenuhi ketiga fungsi dan peranannya dalam mengembangkan pariwisata Kota Surabaya dengan sangat baik melalui banyaknya agenda yang dilakukan, seperti pertukaran informasi, general assembly, serta pengadaan program semacam travel guide events.

1.4.2. Peranan Organisasi Pariwisata Internasional Dalam Peningkatan Daya Saing Pariwisata

Penelitian ketiga bersumber pada jurnal **Transformasi dan Performa Organisasi dalam Membangun Daya Saing Pariwisata** oleh Poerwanto pada tahun 2018. Jurnal ini pada dasarnya membahas tentang peran sebuah organisasi dalam pembangunan daya saing pariwisata. Dalam jurnal ini, Poerwanto berpendapat bahwa teknologi, informasi, dan transformasi dalam era globalisasi telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam struktur organisasi, memungkinkan banyak organisasi untuk bertahan dalam lingkungan yang berubah secara dinamis. Perubahan yang terjadi sebagai hasil dari transformasi dapat bervariasi secara luas, tergantung pada kemampuan dan ukuran masing-masing organisasi. Menghadapi tantangan dalam melakukan transformasi dan perubahan merupakan hal yang penting karena bisa timbul penolakan baik dari individu maupun organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengadopsi perubahan dalam aspek-aspek seperti struktur organisasi, teknologi, tata letak, dan

¹¹ Ulfah Khulafah, *Upaya Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pasific Cities Dalam Mendukung Pariwisata Indonesia di Kota Surabaya Periode 2016-2021*, Jurnal Pariwisata Indonesia, Vol, 18, No, 2 (2022), Indonesia : Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Surakarta.

sumber daya manusia. Organisasi, dalam usaha meningkatkan kapabilitasnya, seringkali perlu mempertimbangkan ulang desain struktur dan sumber daya manusianya. Di masa depan, desain organisasi internasional diharapkan menjadi lebih sederhana, fleksibel, dan dikelola oleh tenaga kerja yang terampil.¹²

Hasil dari penelitian ini adalah organisasi memainkan peranan yang penting dan mampu menjadi media bagi anggota-anggota untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Organisasi internasional dianggap sebagai sebuah kunci keberhasilan dalam industri pariwisata melalui dampak yang disebabkan, seperti pengoptimalisasian sumber daya alam dan manusia. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwasanya performa organisasi merupakan basis dalam peningkatan daya saing pariwisata bagi anggotanya.

1.4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Luar Negeri

Penelitian keempat adalah jurnal **Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi** oleh Adirini Pujayanti pada 2018. Dipaparkan dalam jurnal ini, bahwasanya paradiplomasi dengan pemerintah daerah sebagai aktor utamanya di Indonesia sudah menjadi sebuah kebutuhan yang nyata dalam konteks hubungan internasional di era globalisasi. Dalam praktik paradiplomasi, terdapat hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara dinamika hubungan internasional dan realitas domestik, sehingga menjadi penting untuk memperhatikan isu-isu diplomasi ekonomi secara komprehensif dalam konteks kepentingan dalam negeri.¹³

¹² Poerwanto, *Transformasi dan Performa Organisasi dalam Membangun Daya Saing Industri Pariwisata*, Journal of Tourism and Creativity, Vol, 2, No, 2 (Juli 2018), Indonesia : Universitas Jember.

¹³ Op. Cit.

Paradiplomasi dalam ranah ekonomi dapat menjadi komponen penting dari strategi kebijakan luar negeri Indonesia untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang ditetapkan.

Hasil dari penelitian ini adalah pemaparan tentang pentingnya peran pemerintah daerah untuk turut serta dalam praktik hubungan kerja sama luar negeri. Keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri, sehingga keterlibatan pemerintah daerah sebagai sub-aktor memiliki peranan yang menjadi semakin penting. Dalam jurnal ini juga dipaparkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk turut mengelola daerahnya sendiri dalam hubungan internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya paradiplomasi di Indonesia kebanyakan belum berjalan dengan efektif terutama dalam sektor perekonomian, hal ini disebabkan karena kurang terpadunya kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

1.4.4. Praktik Paradiplomasi di Indonesia

Penelitian kelima adalah jurnal **Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency** oleh Laode Muhamad Fathun pada 2021. Tulisan ini menjelaskan tentang bagaimana praktik paradiplomasi kota Jember untuk meningkatkan daya saing regionalnya dalam berbagai bidang dengan menggandeng kemitraan dengan Jepang dan Kanada. Dijelaskan pemerintah daerah Jember sangat aktif dalam mencari koneksi internasional melalui pembentukan sister-city dan smart-city. Tak hanya pihak dari pemerintah daerah, namun pihak instansi seperti Universitas Jember juga turut serta mengambil peran sebagai aktor

paradiplomasi dalam bidang pendidikan sebagai bentuk ‘*soft power*’ untuk memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan yang dimiliki oleh Jember pada negara asing.

Hasil dari penelitian ini adalah temuan bahwa Kabupaten Jember telah mengadopsi pendekatan paradiplomasi dengan memasukkan seni, budaya, dan identitas lokal sebagai elemen utama dalam menjalin hubungan dengan negara-negara luar. Fokus utamanya adalah menjalin kemitraan dengan beberapa negara terutama Jepang dan Kanada, dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan sektor ekonomi, sumber daya alam, serta transfer teknologi. Dalam praktiknya, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha menjadi pelaku utama dalam paradiplomasi dengan dukungan pihak-pihak terkait seperti Universitas Jember. Meskipun demikian, analisis menyimpulkan bahwa pendekatan paradiplomasi yang diterapkan cenderung bersifat konservatif. Hubungan luar negerinya masih sangat bergantung pada peran fasilitator dan koordinator dari Kementerian Luar Negeri. Selain itu, belum banyak kerjasama internasional yang dilakukan.¹⁴

Tabel 1. 1 Posisi Penelitian

No	JUDUL DAN NAMA PENELITIAN	JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA	HASIL
1.	Upaya Kota Baubau Dalam Bergabung	Deskriptif	Kota Baubau bergabung sebagai anggota Tourism

¹⁴ Laode Muhamad Fathun, *Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness : Case Study of Jember Regency*, Indoensian Perspective, Vol, 6, No, 2 (Desember 2021), Indonesia : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

	<p>Menjadi Anggota TPO (Tourism Promotion Organization For Asia Pacific Cities) Tahun 2019</p> <p>Penulis : Alfahir</p>	<p>Pendekatan : Konsep Paradiplomasi dan Pariwisata Internasional</p>	<p>Promotion Organization tidak terlepas dari tujuan untuk memberikan kontribusi pada perekonomian daerah setempat melalui pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata dianggap tidak mudah dikarenakan adanya persaingan yang cukup tinggi, sehingga perlu diadakan sebuah pendekatan baru untuk mempromosikan pariwisata secara internasional sebagai upaya untuk memelihara, mengembangkan, dan mempromosikan potensi pariwisatanya melalui promosi internasional untuk menarik minat wisatawan asing</p>
2.	<p>Upaya Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific Cities Dalam Mendukung Pariwisata Indonesia di Kota Surabaya Periode 2016-2021</p> <p>Penulis : Ulfah Khulafah</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>TPO mampu memberikan 3 fungsi utama dalam pengembangan pariwisata kota Surabaya, yakni TPO sebagai pusat pemasaran pariwisata, TPO sebagai pusat informasi pariwisata, dan TPO sebagai pusat jaringan pariwisata antar kota. Berdasarkan hasil analisis Ulfah Khulafah, TPO telah berhasil memenuhi ketiga fungsi dan peranannya dalam mengembangkan</p>

		<p>Pendekatan : Teori Organisasi Internasional & City Branding</p>	<p>pariwisata Kota Surabaya dengan sangat baik melalui banyaknya agenda yang dilakukan, seperti pertukaran informasi, general assembly, serta pengadaan program semacam travel guide events.</p>
3.	<p>Transformasi dan Performa Organisasi dalam Membangun Daya Saing Pariwisata</p> <p>Penulis : Poerwanto</p>	<p>Deskriptif</p> <p>Pendekatan : Teori Organisasi Internasional dan Pariwisata</p>	<p>organisasi memainkan peranan yang penting dan mampu menjadi media bagi anggota-anggota untuk meningkatkan daya saing pariwisata. Organisasi internasional dianggap sebagai sebuah kunci keberhasilan dalam industri pariwisata melalui dampak yang disebabkan, seperti pengoptimalisasian sumber daya alam dan manusia. Secara singkat, dapat disimpulkan bahwasanya performa organisasi merupakan basis dalam peningkatan daya saing pariwisata bagi anggotanya</p>
4.	<p>Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan juga dipengaruhi oleh kondisi dalam negeri, sehingga keterlibatan pemerintah daerah sebagai sub-aktor memiliki peranan yang menjadi semakin penting.</p>

	<p>Penulis : Adirini Pujayanti</p>	<p>Pendekatan : Konsep Paradiplomasi</p>	<p>Dalam jurnal ini juga dipaparkan perundang-undangan yang mengatur tentang hak otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi pemerintah daerah untuk turut mengelola daerahnya sendiri dalam hubungan internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya paradiplomasi di Indonesia kebanyakan belum berjalan dengan efektif terutama dalam sektor perekonomian, hal ini disebabkan karena kurang terpadunya kepentingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.</p>
5.	<p>Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency</p> <p>Penulis : Laode Muhamad Fathun</p>	<p>Deskriptif</p>	<p>Jember telah mengadopsi pendekatan paradiplomasi dengan memasukkan seni, budaya, dan identitas lokal sebagai elemen utama dalam menjalin hubungan dengan negara-negara luar. Fokus utamanya adalah menjalin kemitraan dengan beberapa negara terutama Jepang dan Kanada, dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan meningkatkan sektor ekonomi, sumber daya alam, serta transfer teknologi. Dalam</p>

		<p>Pendekatan : Konsep Paradiplomasi</p>	<p>praktiknya, Pemerintah Kabupaten Jember berusaha menjadi pelaku utama dalam paradiplomasi dengan dukungan pihak-pihak terkait seperti Universitas Jember. Meskipun demikian, analisis menyimpulkan bahwa pendekatan paradiplomasi yang diterapkan cenderung bersifat konservatif. Hubungan luar negerinya masih sangat bergantung pada peran fasilitator dan koordinator dari Kementerian Luar Negeri. Selain itu, belum banyak kerjasama internasional yang dilakukan.</p>
--	--	--	--

1.5. Kajian Teori

1.5.1. Konsep Paradiplomasi

Hubungan antarnegara senantiasa mengalami perubahan dinamika karena adanya berbagai kepentingan yang beragam di setiap negara. Perubahan dinamika dunia internasional mampu menyebabkan transformasi sistem internasional dari waktu ke waktu. Perubahan semacam ini terjadi seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi dunia internasional yang semakin kompleks pasca perang dingin. Semulanya, perhatian dunia internasional banyak mengambil fokus dan isu pada masalah keamanan global dan ekonomi, tetapi dalam era globalisasi ini isu global tidak lagi terbatas hanya pada politik, ekonomi, dan keamanan global

sebagai satu-satunya fokus utama. Perubahan situasi dan kondisi internasional menumbuhkan konsepsi baru akan fokus dalam bidang di luar politik dan keamanan, contohnya seperti teknologi, informasi, sumber daya alam, tenaga kerja, energi, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata.

Era globalisasi membuka pintu bagi interkoneksi yang lebih erat antara berbagai negara dan meningkatkan rasa saling ketergantungan di berbagai bidang. Fenomena ini membawa dampak pada peningkatan mobilitas manusia dalam memfasilitasi perubahan di berbagai sektor antar negara-negara di seluruh dunia. Dalam lingkup internasional, globalisasi menciptakan suatu dinamika yang menjadikan dunia terasa semakin kecil dan dekat. Interaksi dan keterkaitan antara manusia dan negara pun semakin lancar, di mana hal ini juga membuka peluang untuk mencapai kesepakatan serta meraih tujuan bersama.¹⁵

Dengan adanya era globalisasi, negara-negara dapat lebih efektif berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling mendukung dalam berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, budaya dan lainnya. Fenomena ini menciptakan suatu atmosfer yang memungkinkan pencapaian tujuan bersama menjadi lebih mudah dijangkau. Dengan kata lain, globalisasi memberikan kesempatan bagi entitas negara untuk saling memahami satu sama lain, mengurangi batasan-batasan yang ada, dan bisa saling mempromosikan kerjasama yang lebih erat di lingkungan internasional.

¹⁵ Setiadi, E. (2015). *Pengaruh Globalisasi dalam Hubungan Internasional*. Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia, 1(1), 11–23. Retrieved from <https://jurnalhiusni.org/index.php/idu/article/view/89>

Berkembangnya praktik antar negara yang dijembatani oleh era globalisasi telah membuka pandangan baru dalam dunia internasional, seperti munculnya konsepsi baru atas praktik hubungan internasional yang lebih variatif. Aktivitas diplomasi dalam hubungan internasional biasanya cenderung mengedepankan aktor negara, namun era globalisasi mampu menghadirkan aktor-aktor non-negara untuk turut serta menjalankan praktik diplomasi.

Menurut Kaohane dan Nye, perkembangan isu-isu baru dalam dunia internasional membawa konsekuensi signifikan dengan melibatkan aktor-aktor baru dalam dinamika hubungan antar bangsa. Transformasi ini tidak lagi bersifat “state centric” yang berarti tidak terbatas pada peran negara semata, melainkan melibatkan pula aktor-aktor transnasional. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk bukan hanya sekedar “interstate relation” tetapi juga mencakup dimensi “transgovernmental relation.”¹⁶

Pentingnya isu-isu baru seperti perubahan iklim, perdagangan global, teknologi informasi, dan lain-lain telah menggeser fokus dari hubungan antarnegara tradisional. Aktor-aktor transnasional seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah kini memainkan peran yang semakin signifikan dalam membentuk hubungan antar-negara. Oleh karena itu, paradigma hubungan internasional berkembang menjadi lebih kompleks dan melibatkan berbagai elemen di luar kendali negara. Dalam konteks “transgovernmental

¹⁶ Keohane, Robert dan Joseph Nye, *Transnasional Relations and World Politics*, MIT Press : JSTOR Vol.3 No.3, 1971, hal. 331

relation”, keterlibatan aktor-aktor non-negara semakin diakui sebagai kekuatan yang mempengaruhi sebuah entitas daerah. Hal ini menciptakan lingkungan hubungan internasional yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan global.

Globalisasi pada akhirnya menciptakan dinamika interaksi yang baru. Dalam dinamika ini, negara sebagai pemain utama mulai membagi kewenangan eksklusif dalam pembuatan kebijakan luar negeri dengan pihak-pihak sub-nasionalnya. Konsep ini membentuk suatu tatanan dunia yang menentang pandangan lama mengenai kedaulatan mutlak yang dianut oleh sistem westphalia.¹⁷ Pentingnya melibatkan aktor-aktor sub-nasional seperti kota atau daerah mencerminkan pergeseran paradigma dalam hubungan internasional. Hal tersebut dianggap sebagai sebuah respons terhadap kompleksitas tantangan global yang semakin meningkat, di mana kerjasama antar berbagai tingkat pemerintahan diakui sebagai kunci untuk mengatasi masalah global. Pembagian kewenangan dalam konteks globalisasi juga memberikan peluang bagi aktor-aktor sub-nasional untuk aktif terlibat dalam diplomasi dan kerjasama internasional. Dengan demikian, globalisasi tidak hanya melibatkan transformasi struktural, tetapi juga membawa dinamika baru dalam peran dan keterlibatan berbagai entitas dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi tantangan global yang semakin kompleks.

¹⁷ Rismanto Pamungkas Salim, *Paradiplomasi Kota Moreland dan Hume, Australia Melalui Kesepakatan Persahabatan dengan Distrik AILUE, Timor Leste 2000 – 2015*, Skripsi, Malang : Jurusan Hubungan Internasional, hal. 20.

Kebebasan entitas sub-nasional dalam menjalankan berbagai kegiatan internasional dapat dijelaskan melalui konsep paradiplomasi. Paradiplomasi sendiri merupakan sebuah konsep yang memberikan ruang gerak bagi entitas lokal, seperti kota atau daerah untuk berpartisipasi dalam aktivitas diplomatis di tingkat internasional. Hal ini mencakup kemampuan untuk menjalin hubungan, mengejar kepentingan, dan berkolaborasi dengan pihak luar negeri tanpa keterlibatan langsung pemerintah pusat. Konsep paradiplomasi memberikan kebebasan yang lebih besar bagi entitas lokal dalam mengelola hubungan internasional mereka, yang dapat berfokus pada kepentingan dan kebijakan yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan demikian, paradiplomasi menjadi mekanisme yang memperluas entitas lokal dalam kerangka hubungan internasional dan memungkinkan entitas lokal untuk aktif terlibat dalam pembentukan pengambilan keputusan untuk mengelola daerah mereka sendiri sesuai dengan situasi kompleksitas yang ada dalam masyarakat lokal mereka.

Pemerintah Indonesia sendiri sangat menyadari bahwa dalam konteks hubungan internasional diplomasi tidak hanya terbatas pada tingkat nasional, melainkan juga dapat melibatkan entitas sub-nasional seperti pemerintah daerah. Penerapan kebijakan untuk mendukung paradiplomasi (desentralisasi otonomi daerah) diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah didasarkan pada perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.¹⁸

¹⁸ Adirini Pujayanti, *Peran Daerah Dalam Diplomasi Ekonomi*, Politica, Vol, 7, No, 3 (Mei 2016), Indonesia: Jurnal DPR, hal. 79.

Paradiplomasi masih dianggap sebagai fenomena baru dalam konteks aktivitas pemerintahan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada perilaku dan kapasitas entitas sub-state seperti pemerintah daerah dalam menjalankan praktik hubungan luar negeri untuk kepentingan spesifik mereka. Istilah '*paradiplomacy*' sendiri pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Saldatos, pada tahun 1980-an. Dia menggabungkan istilah '*parallel diplomacy*' menjadi '*paradiplomacy*' yang merujuk pada kebijakan luar negeri pemerintah non-pusat.¹⁹

Keterlibatan pemerintah lokal dalam panggung internasional mencerminkan perubahan mendasar dalam konsep kedaulatan. Konsep yang dulunya terbatas pada ketentuan eksklusif negara dari sistem westphalia kini mengalami transformasi. Kedaulatan tidak lagi dapat direduksi hanya pada ranah negara semata. Untuk mencapai kedaulatan yang optimal dan memberikan manfaat maksimal kepada penduduknya, suatu negara perlu berbagi kekuasaan atau berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain di area internasional.²⁰ Salah satu bentuk kolaborasi ini dapat terwujud dalam paradiplomasi, di mana pemerintahan regional memiliki peranan yang aktif meski negara lah pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan kata lain, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dibatasi yang batas-batasnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menandakan adanya keseimbangan antara otonomi daerah dengan kewenangan pusat yang memungkinkan negara untuk tetap merumuskan arah kebijakan secara keseluruhan, sementara pemerintah regional

¹⁹ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*, Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, hal. 2.

²⁰ Takdir Ali Mukti, 2020, *Politik Paradiplomasi dan Isu Kedaulatan di Indonesia*, Yogyakarta : The Phinisi Press.

berpartisipasi dalam upaya bersama di tingkat internasional. Dengan demikian, paradigma kedaulatan telah berkembang untuk mencakup dimensi kolaboratif yang mendukung kepentingan bersama dalam lingkup global.

Kewenangan pemerintah daerah untuk terlibat dalam hubungan internasional sebenarnya bukanlah suatu kewajiban mutlak, namun dalam konteks globalisasi yang terus berkembang, keterlibatan ini menjadi suatu kebutuhan mendesak. Suatu daerah menjadi dirasa perlu untuk menjalankan praktik paradiplomasi karena berbagai alasan yang strategis dan potensial bagi perkembangan daerahnya, seperti ; (1) Paradiplomasi membuka peluang bagi daerah untuk memperluas jaringan konektivitas dengan berbagai pihak di luar batas yuridiksi mereka. Melalui kegiatan ini daerah dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan berbagai peluang kerja sama yang mungkin tidak akan muncul dalam batasan hubungan diplomasi yang bersifat tradisional²¹. (2) Paradiplomasi mampu menjadi media bagi pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasannya. Dengan menerapkan praktik paradiplomasi, pemerintah daerah mampu memainkan peran yang lebih proaktif dan mandiri dalam menjalin kerja sama internasional. Proses diplomasi yang biasanya dilakukan berdasarkan pemerintah pusat seringkali memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang panjang untuk mendapatkan persetujuan, di mana hal tersebut dapat menghambat laju pengembangan daerah yang membutuhkan tindakan yang cepat dan responsif. Paradiplomasi

²¹ Risky Novialdi dan Saddam Rasanjani, *Mengkaji Peluang dan Tantangan Praktik Paradiplomasi Pemerintah Daerah di Indonesia dan Kawasan Indo-Pasifik*, Journal of Governance and Social Policy, Vol, 3, No, 2, (December 2022), Banda Aceh : Univesitas Syiah Kuala.

memungkinkan pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif dalam menjalin hubungan langsung dengan berbagai entitas internasional, sehingga daerah dapat dengan lebih cepat mengidentifikasi peluang kerja sama yang strategis dan langsung menindaklanjutinya tanpa harus menunggu birokrasi di tingkat pusat. (3) Paradiplomasi mampu meningkatkan eksistensi wilayah dan menciptakan branding daerah. Paradiplomasi memiliki peran penting dalam meningkatkan eksistensi suatu wilayah, di mana eksistensi yang kuat dan dikenal luas memiliki daya tarik tersendiri yang dapat pula membuka berbagai peluang kerja sama pengembangan dengan negara lain. Dengan menonjolkan potensi signifikan yang dimiliki suatu daerah, baik dalam bidang ekonomi, budaya, pariwisata, maupun sumber daya alam, daerah tersebut mampu menarik mitra strategis lainnya dalam kancah internasional²². (4). Paradiplomasi mampu menyebabkan peningkatan dalam pembangunan nasional. Paradiplomasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan merangsang pembangunan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain. Melalui hubungan internasional yang dijalin oleh pemerintah daerah, berbagai proyek pembangunan dapat diinisiasi dan didukung oleh mitra luar negeri yang berpeluang untuk membawa teknologi baru, pengetahuan, dan investasi berkepanjangan²³.

Sebagai lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, terutama terkait dengan aspek strategis

²² Anggi Koenjaini Putri, *Relasi Pusat-Daerah Dalam Paradiplomasi Bermotif Nasionalistik : Studi Perbandingan Kasus Skotlandia dan Papua*, *Intermestic : Journal of International Studies*, Vol, 7, No, 2 (Mei 2023), Surabaya : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

²³ Nafa Almausofia, *Paradiplomasi dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, diakses dalam <https://kumparan.com/nafaalmaushofia/paradiplomasi-dan-peran-pemerintah-daerah-dalam-pembangunan-nasional-1zRPJ5VBCEb/full> (28/05/2024)

seperti investasi dan perdagangan, pemerintah daerah perlu menyadari perlunya beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di arena internasional.²⁴ Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk merespon tren global dapat mengakibatkan keterbelakangan. Daerah yang tidak mampu mengelaborasi diri terhadap perubahan dalam dunia internasional beresiko menjadi konsumen pasif dari berbagai bentuk kapitalisme global atau sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk memastikan pertumbuhan dan kemajuan, pemerintah daerah perlu menjadi pelaku aktif dalam menjalankan fungsi internasional, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mencegah menjadi hanya konsumen pasif dalam kerangka ekonomi global. Dengan demikian, keterlibatan dalam hubungan internasional tidak hanya menjadi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk memastikan daya saing dan kesejahteraan di tingkat lokal.

Meski masih terbilang baru dalam penerapan praktiknya, Indonesia sendiri merupakan sebuah negara yang sangat mendukung praktik paradiplomasi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya undang-undang yang secara khusus membahas tentang bagaimana kewenangan dalam interaksi antara pemerintah daerah saat melaksanakan kerjasama internasional. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dijabarkan bahwasanya DPRD kabupaten / Kota memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud sebagai kerjasama internasional adalah pembentukan sister-province/ sister-city, kerjasama bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman, kerjasama penyertaan

²⁴ Op. Cit

modal, dan kerjasama lainnya yang tidak menyalahi aturan yang sudah tercantum dalam perundang-undangan.²⁵

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi konsep paradiplomasi dengan mengacu pada karya Takdir Ali Mukti untuk mendalami fenomena paradiplomasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Paradiplomasi, sebagai konsep yang melibatkan perspektif aktif pemerintah daerah dalam urusan luar negeri mampu memberikan dimensi baru pada tradisionalisme hubungan antar-negara yang sebelumnya menjadi fokus utama dalam politik internasional. Konsep paradiplomasi mengakui perubahan dinamika politik internasional yang melibatkan aktor-aktor non-negara, termasuk pemerintah daerah dalam meningkatkan keterlibatan mereka dalam urusan internasional. Dengan melibatkan perspektif paradiplomasi, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana keterlibatan pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi pada upaya memahami dan mengelola hubungan internasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

1.5.2. Konsep Manajemen Destinasi Wisata

Manajemen destinasi pariwisata mencakup penerapan berbagai teknik dan strategi manajemen untuk mengembangkan, merencanakan, dan mengendalikan suatu destinasi wisata. Proses ini tidak hanya fokus pada satu aspek saja, tetapi juga mencakup pengelolaan berbagai elemen yang berperan dalam industri pariwisata seperti pengembangan atraksi wisata, fasilitas, pengembangan sumber daya

²⁵ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*

manusia, dan layanan yang ditawarkan kepada wisatawan, serta perluasan jaringan promosi²⁶.

Tak bisa dipungkiri bahwasanya promosi merupakan sebuah kunci utama dalam kesuksesan bisnis pariwisata. Promosi memiliki peranan krusial dalam industri pariwisata di mana daya tarik dan visibilitas menjadi elemen penting dalam memperoleh keberhasilan.²⁷ Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa dalam konteks bisnis pariwisata, promosi bukan hanya sekedar aspek tambahan, melainkan kunci yang mendasar untuk mencapai tujuan.

Dalam persaingan yang semakin ketat di industri pariwisata, promosi menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan destinasi atau layanan kepada khalayak target. Peningkatan visibilitas melalui berbagai saluran pemasaran, termasuk media sosial, iklan, dan promosi langsung dapat memberikan dorongan signifikan terhadap jumlah kunjungan dan keberlanjutan bisnis. Selain itu, promosi tidak hanya tentang menarik perhatian, tetapi juga tentang menciptakan citra positif dan membangun kesadaran branding. Pemahaman konsumen terhadap nilai dan keunikan suatu destinasi atau layanan dapat ditingkatkan melalui kampanye promosi yang tepat.

Aktivitas promosi dalam level lokal maupun internasional merupakan suatu hal yang perlu untuk dilakukan. Promosi mampu membantu menciptakan kesadaran

²⁶ Dimitrios Buhalis, *Marketing the Competitive Destination of the Future*, *Tourism Management*, Vol, 21, No, 1 (Februari 2000), London : University of Westminster.

²⁷ Miruna Diana Moza, *Promotion in Tourism : a Brief History and Guideliness of the New Communication Paradigm*, *The annals of the University of Oradea*. Romania : University of Oradea.

publik tentang destinasi wisata, meningkatkan jumlah kunjungan, dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah. Informasi yang disampaikan melalui promosi dapat membantu destinasi pariwisata memperoleh perhatian dari calon wisatawan, seperti halnya memotivasi masyarakat untuk merencanakan perjalanan mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang ditawarkan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan kunjungan secara langsung.

Lebih dari sekedar meningkatkan jumlah pengunjung, promosi juga diyakini memiliki dampak terhadap perekonomian secara signifikan. Peningkatan wisatawan dapat meningkatkan pendapatan di sektor pariwisata, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendukung pertumbuhan usaha lokal. Hal ini membawa manfaat ekonomi tidak hanya bagi pemangku usaha pariwisata besar, namun juga untuk pemangku bisnis mikro kecil menengah di area destinasi tersebut. Selain itu, promosi dapat menjadi alat untuk memberdayakan komunitas lokal dengan menyoroti warisan budaya, tradisi, dan keunikan setempat. Hal ini membantu mempertahankan identitas lokal dan mengembangkan branding bagi daerah pariwisata yang berkaitan.

Dalam manajemen destinasi pariwisata perlu diperhatikan bahwasanya tren pariwisata dapat terus berubah-ubah, sehingga perlu bagi suatu destinasi pariwisata untuk mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Maka dari itu, manajemen destinasi pariwisata juga menekankan akan pentingnya untuk melakukan upaya peningkatan kualitas pengalaman bagi pengunjung, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pengembangan destinasi pariwisata itu sendiri untuk menunjang keberhasilan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang komprehensif terkait suatu fenomena.²⁸ Penelitian deskriptif menjadi sarana untuk memahami secara lebih baik suatu gejala atau peristiwa, dan hasil akhirnya menciptakan kerangka pemahaman yang lebih lengkap. Dengan mengandalkan data empiris dan fakta, penelitian deskriptif memberikan kontribusi dalam membangun gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi. Dalam pendekatan ini, penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Batu dengan menggunakan data dan fakta sebagai dasar analisis.

1.6.2. Metode Analisa Data

Metode analisa yang penulis gunakan adalah metode analisis berbasis kualitatif, yang merupakan metode dengan pendekatan untuk mendapatkan, membuktikan, dan mengembangkan data yang diinginkan. Pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks dan makna dibalik data yang ditemukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali nuansa dan kompleksitas fenomena yang mungkin sulit diukur secara kuantitatif.²⁹

²⁸ Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : ALFABETA.

²⁹ Dyah Budiastuti, 2018, *Validitas dan Realiabilitas Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap-tahap pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mencakup upaya untuk menyusun batasan penelitian yang jelas, menggali informasi melalui observasi langsung, dan merancang data sistematis untuk merekam dan mencatat informasi yang ditemukan.³⁰ Teknik pengumpulan yang digunakan penulis dalam penulisan jurnal ini bersumberkan pada data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari kajian pustaka yang bersumber pada jurnal, laporan resmi, buku, skripsi, thesis, serta sumber-sumber lainnya. Sedangkan data primer penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait di Kota Batu seperti Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Batu, jajaran staff Dinas Pariwisata Kota Batu, serta Sekretariat Bagian Kerjasama Kota Batu.

1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian

a) Batasan Materi Penelitian

Batasan materi dalam penelitian ini ditetapkan untuk mengarahkan dan membatasi penulis agar terarah juga konsisten dalam membahasannya. Sehingga untuk penelitian ini batasan yang digunakan oleh penulis adalah “Peran Tourism Promotion Organization (TPO) for Asia Pacific dalam Pengembangan Pariwisata Kota Batu melalui praktik Paradiplomasi (2021-2023)”

b) Batasan Waktu Penelitian

³⁰ Cresswell, J.W, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Batasan waktu penelitian yang digunakan adalah dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Batasan waktu dimulai dari tahun 2021 dikarenakan Pemerintah Kota Batu mulai melakukan inisiasi dan bergabung dalam Tourism Promotion Organization pada tahun 2021, sedangkan batas akhir ditetapkan hingga tahun 2023 mengingat aktivitas ini masih berlangsung hingga saat ini.

1.7. Argumen Pokok

Dengan menggunakan konsep paradiplomasi dan manajemen destinasi wisata, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan upaya paradiplomasi Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui Tourism Promotion Organization. Paradiplomasi, yang mengacu pada keterlibatan pemerintah daerah dalam diplomasi internasional, memberikan kerangka kerja yang relevan untuk memahami bagaimana Kota Batu berinteraksi dengan organisasi internasional untuk memajukan pariwisatanya. Di sisi lain, konsep manajemen destinasi wisata menawarkan pendekatan strategis untuk mengelola dan mempromosikan destinasi secara efektif.

Berdasarkan hipotesis awal yang disusun dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, Pemerintah Kota Batu telah berhasil memanfaatkan TPO untuk memperluas jaringan promosi pariwisatanya ke pasar internasional. Melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Asia Pasifik, Kota Batu mampu meningkatkan visibilitas dan daya tarik sebagai destinasi wisata unggulan. Kota Batu memanfaatkan kegiatan promosi yang disediakan oleh TPO,

termasuk kampanye pemasaran digital dan partisipasi dalam pertukaran informasi pariwisata, untuk menjangkau audiens global secara lebih efektif.

Selain itu, Kota Batu juga memanfaatkan keanggotaan dalam TPO untuk mengembangkan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata. Dengan mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh TPO, Kota Batu dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku pariwisata lokal. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kerja di sektor pariwisata Kota Batu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada wisatawan. Pelatihan yang diikuti mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen destinasi hingga pemanfaatan teknologi sebagai alat pendukung pariwisata. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme dan kinerja individu, tetapi juga memperkuat daya saing keseluruhan destinasi.

Dengan menggabungkan pendekatan paradiplomasi dan manajemen destinasi wisata, penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Kota Batu dapat memanfaatkan kolaborasi internasional untuk memajukan pariwisata lokal. Analisis ini menyoroti strategi efektif dalam memanfaatkan jaringan global untuk memperluas jangkauan promosi serta pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di Kota Batu serta

destinasi lain yang ingin mengadopsi pendekatan serupa untuk mengembangkan pariwisata mereka.

1.8. Sistematika Penulisan

Bab	Bahasan Pokok
BAB I Pendahuluan	1.1.Latar Belakang Masalah 1.2.Rumusan Masalah 1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan Penelitian 1.3.2. Manfaat Penelitian a. Manfaat Akademis b. Manfaat Praktis 1.4. Penelitian Terdahulu 1.4.1. Paradiplomasi Entitas Sub-Nasional di Indonesia Dengan Tourism Promotion Organization. 1.4.2. Peranan Organisasi Pariwisata Internasional Dalam Peningkatan Daya Saing Pariwisata. 1.4.3. Peran Pemerintah Daerah dalam Hubungan Luar Negeri 1.4.4. Praktik Paradiplomasi di Indonesia 1.5.Kajian Teori 1.5.1. Konsep Paradiplomasi 1.5.2. Konsep Manajemen Destinasi Wisata 1.6. Metodologi Penelitian 1.6.1. Jenis Penelitian 1.6.2. Metode Analisa Data 1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 1.6.4. Ruang Lingkup Penelitian 1.7. Argumen Pokok 1.8. Sistematika Penulisan
BAB II Kondisi Pariwisata Kota Batu dan Kolaborasi Bersama Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific	2.1. Kondisi Pariwisata Kota Batu 2.2. Profil dan Manfaat Keanggotaan Dalam Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific Bagi Sektor Pariwisata Kota Batu 2.3. Bergabungnya Kota Batu dalam Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific 2.4. Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific Sebagai Mitra Paradiplomasi Kota Batu
BAB III Upaya Paradiplomasi Pemerintah Kota Batu Dalam	3.1. Kota Batu Memanfaatkan Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific sebagai Pusat Jaringan Promosi Pariwisata

Mengembangkan Sektor Pariwisata Melalui Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific dan Tantangannya	3.2. Kota Batu Memanfaatkan Tourism Promotion Organization (TPO) For Asia Pacific Cities sebagai Fasilitator Peningkatan Kualitas dan SDM Pariwisata 3.3. Peluang dan Tantangan Dalam Praktik Paradiplomasi Kota Batu dengan Tourism Promotion Organization.
BAB IV Kesimpulan dan Saran	4.1. Kesimpulan 4.2. Saran
Daftar Pustaka	

